



# LAPORAN KINERJA (LAKIN) KPKNL BOGOR



## TAHUN ANGGARAN 2022

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I.....	1
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	7
BAB II.....	10
A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS.....	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	12
BAB III.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RENSTRA.....	18
C. ANALISIS KINERJA .....	18
D. REALISASI ANGGARAN.....	22
E. PRESTASI KERJA.....	23
BAB IV .....	24
LAMPIRAN.....	25

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020.

KPKNL Bogor merupakan salah satu kantor vertikal DJKN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, dengan wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Tahun 2022, KPKNL Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja KPKNL Bogor Tahun 2022 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja KPKNL Bogor ini akan dibandingkan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2022 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2022, serta penjelasan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan dapat dijadikan sebagai pedoman menenrukan kebijakan serta pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bogor, 24 Januari 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Berkaitan dengan hal dimaksud, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

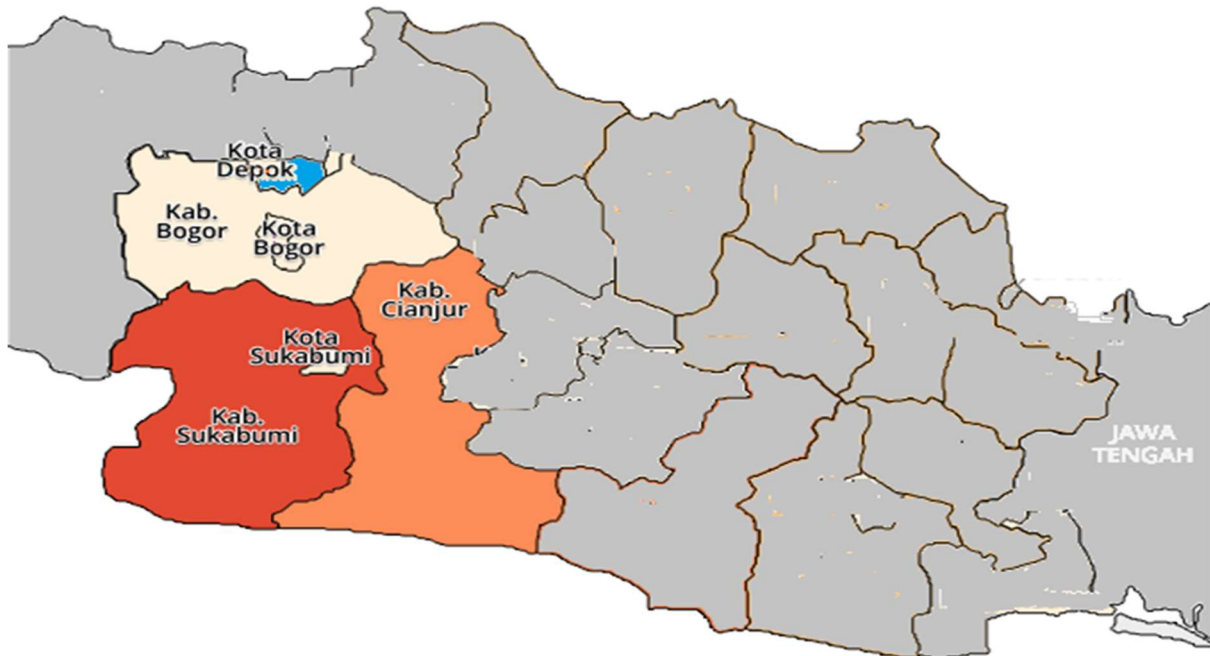
KPKNL Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berupaya melakukan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Melalui Laporan Kinerja KPKNL Bogor Tahun 2022 ini, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah KPKNL Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas. Dan diharapkan masyarakat atau stakeholder dapat memberikan masukan kepada KPKNL Bogor demi perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

### **A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

dibentuklah KPKNL Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Gambar 1.1 Peta wilayah kerja KPKNL Bogor



Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut.

### **VISI**

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

### **MISI**

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor melandasi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- **Integritas**  
berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme**  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi**  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- **Pelayanan**  
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- **Kesempurnaan**  
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor juga memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan moto "**BAGEUR**" yaitu **Bersih, Amanah, Gesit, Unggul, dan Ramah**. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bogor dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

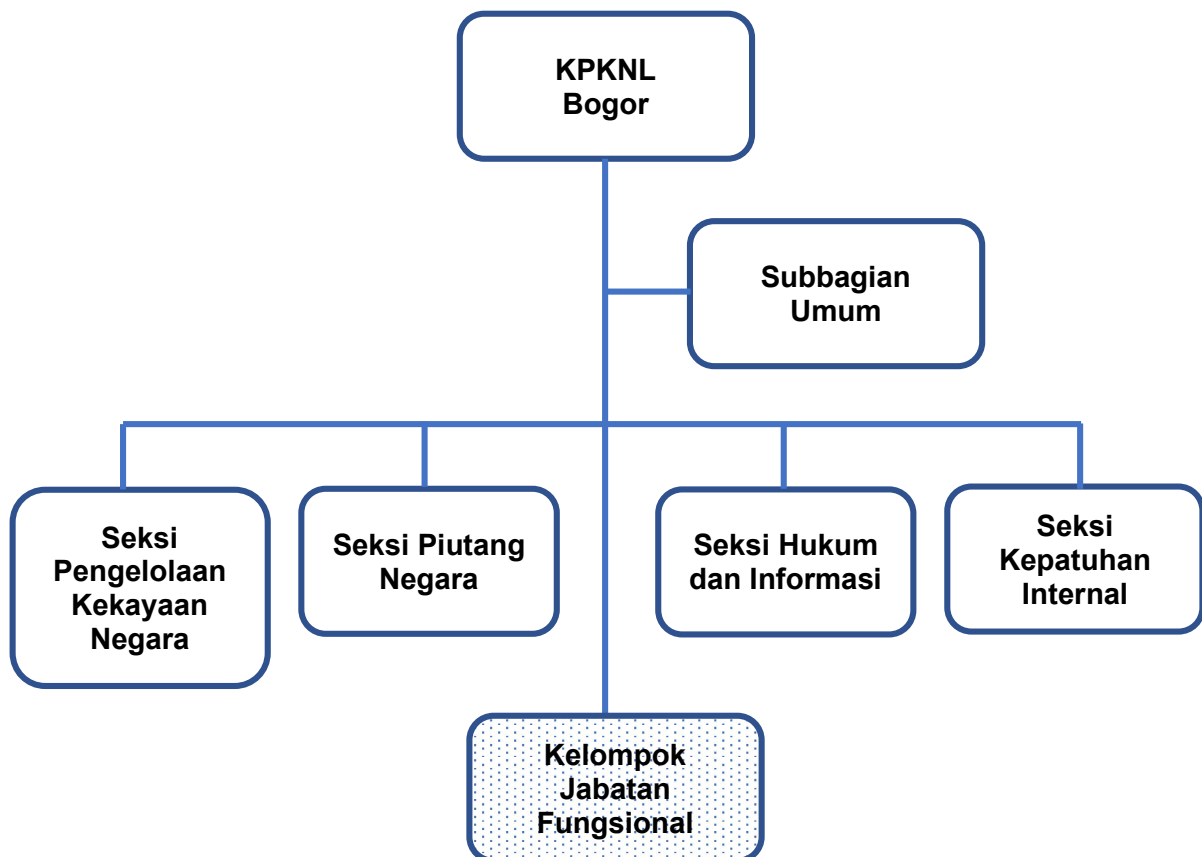
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Adapun fungsi KPKNL Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 yaitu:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;

- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Bogor dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum Informasi, Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi pada KPKNL Bogor sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPKNL Bogor



Tugas pokok, fungsi dari setiap jabatan yang terdapat pada KPKNL Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan,

perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Bogor. Formasi pegawai pada Subbagian Umum terdiri dari 1 (satu) Kepala Subbagian, 10 (sepuluh) pegawai pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

## **2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara. Formasi Seksi Pengelola Kekayaan Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

## **3. Seksi Piutang Negara**

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Formasi Seksi Piutang Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 4 (empat) pegawai pelaksana.

## **4. Seksi Hukum dan Informasi**

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, peny1apan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Formasi Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

## **5. Seksi Kepatuhan Internal**

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Formasi Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 4 (empat) pegawai pelaksana.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada KPKNL Bogor terdapat kelompok jabatan fungsional yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi KPKNL Bogor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formasi Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Bogor terdiri dari 1 (satu) Pelelang Ahli Madya, 4 (empat) Pelelang Ahli Muda, 3 (tiga) Pelelang Ahli Pertama, 2 (dua) Penilai Pemerintah Ahli Muda, 3 (tiga) Penilai Pemerintah Ahli Pertama, dan 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.

Jumlah pegawai KPKNL Bogor pada 31 Desember 2022 adalah 62 Pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 5 (lima) Kepala Seksi, 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Ahli, 1 (satu) Pejabat Fungsional Terampil, 28 Pegawai Pelaksana, dan 14 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPKNL Bogor mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Bogor menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Sebagai salah satu unit vertikal DJKN, KPKNL Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Bogor tidak hanya kepada *stakeholder* instansi pemerintah namun juga melayani masyarakat umum, misalnya dalam pelayanan di bidang lelang dan piutang negara. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL Bogor selalu diupayakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran strategis KPKNL Bogor dalam melakukan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang secara garis besar terurai di bawah ini.

### **1. Pengelolaan Kekayaan Negara**

Dalam melakukan pengelolaan kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara serta registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan:

- Menghilangkan *high operational cost*.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengharmonisasikan ketentuan perundangan kekayaan negara antar sektor.
- Mengetahui jumlah, keberadaan dan besaran nilai riil kekayaan negara.
- Tersusunnya Neraca Kekayaan Pemerintah dan Neraca Kekayaan Negara.
- Optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengatur pengurusan terhadap kekayaan negara, baik yang *existing* maupun *disposal*.
- Menghindari *dispute* antara instansi/unit pengelola kekayaan negara.

Salah satu lingkup pengelolaan kekayaan negara yaitu pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya sah. Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kapastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Proses pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra kerja KPKNL Bogor ada sebanyak 310 (tiga

ratus sepuluh) Satker. Selama tahun 2022, Pengelolaan BMN pada KPKNL Bogor telah menghasilkan PNPB sebesar Rp32.877.400.358,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

## **2. Pelayanan Penilaian**

Pelayanan Penilaian pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:

- a. Barang Milik Negara;
- b. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal;
- c. kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara;
- d. kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain;
- e. barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara;
- f. penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka:

- a. keperluan lelang sitaan pajak;
- b. keperluan lelang barang-barang eks tegahan kepabeanan dan cukai;
- c. pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah;
- d. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara;
- e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; atau
- g. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penilaian, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dalam akan menggunakan analisis sesuai dengan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*The Highest and The Best Use*), analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar properti, sehingga Penilai DJKN menghasilkan nilai yang akurat dan akuntabel. Dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penilai DJKN mempunyai peran yang strategis dalam mendukung Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel.

## **3. Pengurusan Piutang Negara**

Piutang Negara yang dikelola oleh KPKNL Bogor adalah piutang yang sudah dikategorikan macet yang diserahkan baik oleh instansi pemerintah maupun badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul

karena perjanjian, peraturan perundang-undangan maupun sebab apapun yang pengelolaannya diserahkan pada KPKNL.

Selama Tahun 2022, pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Bogor telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp44.500.157,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). PNBP tersebut disetorkan kepada kas Negara dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dan dana PNBP tersebut akan disalurkan kembali pada masyarakat sebagai dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian.

#### **4. Pelayanan Lelang**

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Penjualan melalui lelang memberikan keuntungan bagi pihak masyarakat, instansi-instansi yang membutuhkan yang mungkin berbeda dari sisi keperluan maupun pemerintah. Bagi masyarakat penjualan melalui lelang memberikan jaminan kepastian hukum atas barang-barang yang dibeli serta mendapatkan transaksi yang transparan dan efisien. Bagi instansi atau badan-badan usaha yang dilayani memberikan media untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat dengan harga yang maksimal, dengan tersedianya dana maka akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Disamping itu, bagi pemerintah, lelang juga memiliki fungsi *budgeter* untuk mengumpulkan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk bea lelang, PPh dan BPHTB guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bogor selama tahun 2022 sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) lot lelang dengan 704 lot lelang laku terjual. Adapun penerimaan negara dari bea lelang yang dihasilkan sebesar yaitu Rp.33.651.062.531,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Dengan demikian, pelayanan lelang mempunyai peranan yang sangat strategis karena merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pengelolaan organisasi dan manajemen kinerja yang baik, maka Kementerian Keuangan menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* merupakan alat pengukuran kinerja dan manajemen yang mampu memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan perspektif-perspektifnya yang menyeimbangkan ukuran finansial dan non finansial baik internal maupun eksternal organisasi. *Balanced Scorecard* juga dapat memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang serta merupakan suatu sistem pengendalian strategis yang memberikan payung bagi pengendalian manajemen agar aktivitas operasional terhubung dengan strategi organisasi.

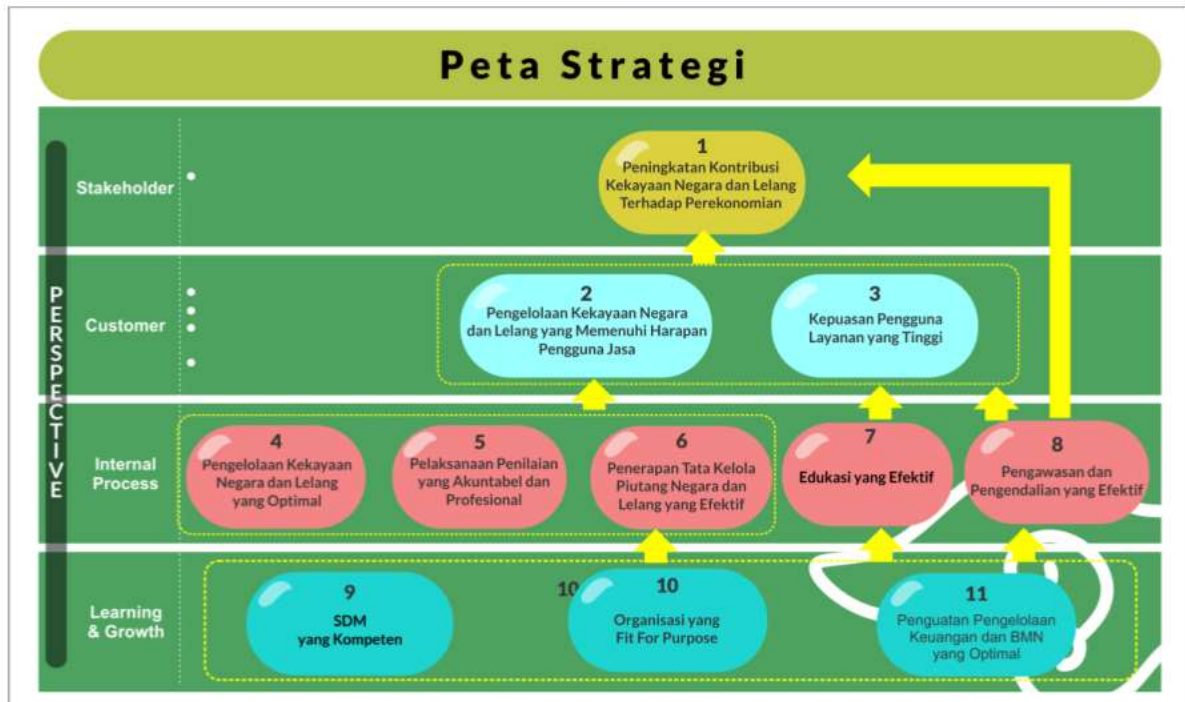
Pelaksanaan *Balanced Scorecard* pada KPKNL Bogor dimulai dari penandatanganan Kontrak Kinerja *Kemenkeu-Three* yang dilakukan setiap awal tahun sebagai bentuk perencanaan kinerja organisasi. Kontrak Kinerja ini disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS**

Perencanaan kinerja KPKNL Bogor dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kepala KPKNL Bogor. Penandatanganan Kontrak Kinerja merupakan cerminan dari kesanggupan untuk meraih dan melampaui target yang telah ditetapkan serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan KPKNL Bogor sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun.

Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Bogor Tahun 2022 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS), 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Bogor



Peta strategi KPKNL Bogor terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

**1. Stakeholder Perspective**

*Perspective* yang berkaitan dengan *stakeholder* KPKNLBogor dan untuk mengetahui kinerja KPKNL Bogor yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal.

**2. Customer Perspective**

*Perspective* yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. *Customer perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu kepuasan pengguna layanan dan kepatuhan yang tinggi atas Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara. Pelanggan atau pengguna jasa KPKNL bogor yaitu Satuan Kerja K/L, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang.

**3. Internal Process Perspective**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. *Internal process perspective* terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu pelayanan yang berkualitas, penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang optimal, edukasi yang efektif, pengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### 4. *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Bogor yang dimiliki sebagai modal untuk untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu SDM yang kompetitif, organisasi yang kondusif, sistem manajemen informasi yang andal, dan pengelolaan anggaran yang optimal.

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Bogor berjumlah 11 (sebelas), yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.
7. Edukasi yang Efektif.
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.
9. SDM yang Kompeten.
10. Organisasi yang Fit For Purpose.
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut di atas, telah ditetapkan indikator atau tolak ukur keberhasilan pencapaiannya yaitu berupa Indikator Kinerja utama (IKU). IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Bogor yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Antara Sasaran Strategis dengan IKU terdapat keterkaitannya, yaitu sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 2.1 Daftar IKU KPKNL Bogor Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perbandingan antara target/rencana IKU dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bogor tahun 2022 adalah sebesar 110,23% (seratus sepuluh koma dua puluh tiga persen). Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Capaian KPKNL Bogor Tahun 2022

Perspective	Bobot	Nilai
<b>Stakeholder</b>	25%	26,24%
<b>Customer</b>	15%	16,80%
<b>Internal Process</b>	30%	33,33%
<b>Learning end Growth</b>	30%	33,86%
<b>NKO</b>		110,23%

Kinerja KPKNL Bogor tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini nampak adanya peningkatan NKO dari 108,06% (tahun 2021) menjadi 110,23% (tahun 2022). Selama tahun 2022, KPKNL Bogor memiliki 20 (dua puluh) IKU dan pada akhir tahun terdapat 1 (satu) IKU status kuning, yaitu IKU Persentase Produktivitas Lelang dengan realisasi sebesar 32,38% dari target 36%.

Penyebab dari IKU Persentase Produktivitas Lelang yang tidak tercapai adalah karena frekuensi lelang yang sangat tinggi pada KPKNL Bogor. Selain itu, sebagian besar objek lelang adalah Hak Tanggungan yang merupakan barang kurang *marketable* dengan nilai limit yang masih cukup tinggi. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya dari akibat dampak pandemic Covid19. Meskipun demikian, KPKNL Bogor telah berupaya melakukan koordinasi dengan pemohon lelang maupun dengan pihak perbankan untuk menambah frekuensi lelang UMKM yang produknya lebih *marketable* dan lebih mudah dijangkau oleh daya beli masyarakat sehingga IKU ini dapat tercapai mendekati target yang telah ditetapkan (32,38% dari target 36%).

Secara keseluruhan, Capaian Kinerja IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian IKU KPKNL Bogor Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	138,63%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%	32,38%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	142,03%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	229,72%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55	4,73
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	78,22%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	141,09%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	143,17%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	102,54%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,40%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%
		6b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0,00%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90	92,35

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	85,11%
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	100%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	114,35%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	97,14
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	97,23
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,87%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	195,87%

Meskipun telah 2 tahun berlalu sejak Pandemi Covid19 pada 2020 lalu, namun dampaknya tetap terasa hingga saat ini. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi KPKNL Bogor untuk melampaui target kinerjanya. Hal ini terbukti dari capaian Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2022 sebesar 110,23%, naik dari capaian kinerja tahun 2021 sebesar 108,06%. Selain itu, hampir seluruh IKU pada tahun 2022 tercapai melebihi target (berstatus hijau). Hanya ada 1 IKU dengan status kuning yaitu IKU Persentase Produktivitas Lelang, itupun tetap mengalami kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 29,27% dari target 35%, menjadi 32,38% dari target 36%.

Pandemi yang terjadi sampai saat ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih dirasakan dan masih memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Kebijakan WFH mempengaruhi kegiatan/aktivitas pelaksanaan tugas yang menyebabkan adanya kendala dalam upaya mencapai target pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, KPKNL Bogor tetap berupaya melakukan berbagai upaya dan rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

## B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RENSTRA

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Presiden.

DJKN telah menyusun Renstra KPKNL Bogor Tahun 2020-2024 yang berisi arah kebijakan KPKNL Bogor yaitu mendorong peningkatan kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang secara profesional dan akuntabel demi mewujudkan visi dan misi dari KPKNL Bogor.

Dalam upaya memenuhi capaian realisasi IKU, KPKNL Bogor berupaya sejalan dengan kebijakan Renstra Tahun 2020-2024 dengan mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberikan dampak buruk dalam situasi pandemi Covid19. Adapun perbandingan realisasi kinerja KPKNL Bogor selama periode Renstra 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

IKU	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bea Lelang	38.765.000.000	16.909.890.514	30.097.000.000	29.214.537.439	27.000.000.000	33.651.062.531
Pokok Lelang	930.373.000.000	502.229.709.490	639.000.000.000	921.504.302.230	681.600.000.000	968.067.603.183

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peningkatan realisasi capaian IKU khususnya untuk IKU Bea Lelang dan Produktivitas Lelang. Pada tahun 2020, target kedua IKU tersebut tidak dapat tercapai (status merah) disebabkan oleh dampak ekonomi Pandemi Covid19. Kemudian setelah dilakukan berbagai upaya dan rencana aksi, pada tahun 2021 KPKNL Bogor berhasil memperbaiki realisasi kinerja sehingga IKU Pokok Lelang tercapai dan IKU Pokok Lelang hampir tercapai (status kuning). Pada tahun 2022, upaya dan perbaikan terus dilakukan sehingga kedua IKU ini dapat tercapai dengan maksimal (status hijau).

## C. ANALISIS KINERJA

Pada tahun 2022, KPKNL Bogor telah melalui berbagai tantangan, kendala dan permasalahan dalam pencapaian realisasi kinerja. Berbagai upaya dan rencana aksi telah dilakukan sehingga diperoleh nilai realisasi kinerja yang maksimal. Adapun permasalahan, kendala dan rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Bogor selama tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

## 1. **Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja terkait Pengelolaan Kekayaan Negara**

### a. Permasalahan

- 1) Target PNBPN Pengelolaan BMN yang lebih tinggi dibandingkan potensi PNBPN yang ada.
- 2) Formula perhitungan pengukuran SBSK yang kerap terdapat perubahan/penyesuaian formula dari Direktorat BMN.
- 3) Beberapa target Sertifikasi BMN merupakan satker subordinasi yang lokasi satkernya berada di luar wilayah kerja KPKNL Bogor, sehingga diperlukan upaya koordinasi yang lebih intens.
- 4) Petugas/*operator* BMN pada satker banyak yang merangkap tugas lain sehingga *updating* tindak lanjut tidak dapat segera disampaikan kepada KPKNL.
- 5) Tindak lanjut atas persetujuan melibatkan koordinasi satker dengan unit kerja/pihak lain sehingga terkadang hambatan bukan semata-mata dari satker bersangkutan.
- 6) Beberapa satker masih membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan proses melengkapi berkas usulan sertifikasi BMN sebelum menyampaikan surat permohonan secara resmi ke Kantor Pertanahan (Kantah).

### b. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Menghimbau satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterima.
- 2) Mengirim surat ke satker agar menyampaikan laporan pelaksanaan atas surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh KPKNL.
- 3) Melaksanakan pelaksanaan rapat koordinasi dengan Satker dan Kantah untuk pembahasan pensertipikatan.

### c. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Tetap berkoordinasi dengan satker untuk memantau tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang berdampak pada PNBPN.
- 2) Mendorong satker agar melakukan percepatan pengajuan usulan penjualan atas BMN yang telah rusak berat/dihentikan penggunaannya.
- 3) Mengadakan sosialisasi/webinar dengan tema mengenai Pemanfaatan BMN.
- 4) Selalu berkoordinasi dengan satker agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterimanya.
- 5) Melanjutkan pengumpulan data dan perhitungan pengukuran SBSK.
- 6) Menjawab/menanggapi/menyelesaikan setiap permohonan/usulan BMN dari satker sesuai SOP Layanan yang telah ditetapkan.

- 7) Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kantor Pertanahan dan juga satker atas progress kegiatan pensertipikatan BMN berupa tanah.

## **2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja terkait Piutang Negara**

### **a. Permasalahan**

- 1) Keberadaan debitur tidak diketahui, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Namun, karena tidak memiliki SDM untuk melakukan pemeriksaan, maka untuk pemeriksaan sendiri perlu dimintakan bantuan kepada Kanwil.
- 2) Jumlah utang besar tidak didukung barang jaminan, atau andaikan pun terdapat barang jaminan, barang jaminannya tidak marketable, seperti girik/letter C, lokasinya tidak dapat diakses, maupun BPKB atau deposito yang sudah tidak memiliki nilai.
- 3) Masa berlaku sertifikat (SHGB) barang jaminan telah berakhir.

### **b. Tindakan yang telah Dilaksanakan**

- 1) Aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, baik kepada debitur yang tidak memiliki barang jaminan maupun debitur yang memiliki barang jaminan (*shock therapy* akan eksekusi barang jaminan).
- 2) Mengirimkan kembali surat penagihan dan surat pemberitahuan kepada debitur terkait *Crash Program*.
- 3) Melakukan penagihan dan penelusuran aset serta berkoordinasi dengan aparat Kelurahan/desa.
- 4) Penyampaian Surat Paksa sebagai prasyarat mekanisme pengurusan sederhana.

### **c. Rekomendasi Rencana Aksi**

- 1) Optimalisasi pengurusan PN melalui penyampaian Surat Paksa dan penelitian lapangan khususnya untuk debitur dengan jumlah hutang s.d. kurang dari Rp500 juta yang tidak memiliki barang jaminan agar dapat ditindaklanjuti dengan PSBDT.
- 2) Melanjutkan penelusuran debitur dan barang jaminan dan berkoordinasi dengan pemda setempat.
- 3) Tetap aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, menghimbau untuk mengikuti program keringanan hutang dan melakukan penelusuran keberadaan debitur dan barang jaminan.

## **3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja terkait Lelang**

### **a. Permasalahan**

- 1) Rendahnya peminat lelang di masyarakat, terutama untuk lelang properti, sehingga lelang cenderung susah untuk laku.
- 2) Kondisi perekonomian yang lesu dan daya beli masyarakat yang rendah akibat kondisi pandemi Covid-19.
- 3) Harga limit lelang di atas harga pasar.

- b. Tindakan yang telah Dilaksanakan
  - 1) Penggalian potensi lelang (*door to door*) ke pemohon lelang.
  - 2) Menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
  - 3) Imbauan kepada Pemohon Lelang agar mengajukan nilai limit berpedoman pada Laporan Penilaian setinggi-tingginya harga pasar.
- c. Rekomendasi Rencana Aksi
  - 1) Penggalian potensi lelang, termasuk terhadap BMN di satker yang sudah tidak digunakan dan juga terhadap kurator dan perbankan yang memiliki potensi nilai objek lelang yang tinggi, Kejaksaan yang memiliki potensi frekuensi tinggi.
  - 2) Sosialisasi dengan pihak pemohon lelang baik satker, bank, maupun balai lelang dan menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
  - 3) Apresiasi terhadap pemohon lelang dengan pokok lelang terbesar dan produktivitas lelang terbaik.
  - 4) Kembali menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
  - 5) Melakukan penginputan dropbox secara berkala dengan akurat.

#### **4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja terkait Penilaian**

- a. Permasalahan
 

Kurangnya pemahaman dari Pengguna Barang mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai suatu objek penilaian.
- b. Tindakan yang telah Dilaksanakan
  - 1) Memberikan edukasi kepada pengguna barang secara langsung pada saat Tim Penilai melakukan survei lapangan
  - 2) Melakukan analisis pasar yang lebih mendalam.
- c. Rekomendasi Rencana Aksi
  - 1) Melanjutkan pemberian edukasi secara langsung kepada pengguna barang pada saat survei lapangan.
  - 2) Memperkuat analisis pasar properti sehingga nilai yang terbentuk mencerminkan harga yang berlaku di pasaran pada kondisi tertentu.

#### **5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja terkait *Supporting Unit***

- a. Permasalahan
  - 1) Pegawai yang bersangkutan ditempatkan di seksi yang tidak sesuai dengan pendidikan dan diklat yang dimiliki.
  - 2) Terdapat deviasi halaman III DIPA yang cukup besar dan capaian output yang belum tercapai.
  - 3) Masih terdapat pegawai yang belum memahami secara penuh tentang pentingnya pengelolaan kinerja untuk mendukung kinerja organisasi maupun kinerja individu

yang bersangkutan. Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan kesadaran dari pegawai yang bersangkutan untuk *aware* terhadap pengelolaan kinerjanya.

b. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Menyampaikan imbauan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat baik melalui e-learning dan tatap muka dan menyampaikan usulan kepada kantor pusat untuk memanggil peserta diklat pegawai yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bogor dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.
- 4) Menyusun Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* s.d. *Five*, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2021.
- 5) Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat/pegawai.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan terkait pengelolaan kinerja dan laporan pelaksanaan DKO sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
- 7) Melakukan internalisasi terkait kinerja.

c. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.
- 2) Melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.
- 3) Melakukan monitoring dan pengawasan agar temuan tidak terulang kembali.
- 4) Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan kinerja secara berkala.

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Pagu Anggaran KPKNL Bogor seperti yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.429.445.000,000 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.273.564.751,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 93,58% dari total pagu anggaran setelah revisi terakhir. Adapun IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) tercapai sebesar 95,87% dari target 95,50%.

## **E. PRESTASI KERJA**

Selama tahun 2022, KPKNL Bogor memperoleh beberapa penghargaan dalam ruang lingkup regional, beberapa penghargaan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Peringkat Keempat Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Kategori Nilai IKPA Terbaik (100).
2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 Satker Kecil (SPM < 200) Lingkup KPPN Bogor Kategori Persentase Penolakan SPM yang Paling Rendah.
3. Satuan Kerja dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Bogor pada Tahun Anggaran 2022 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Produktivitas Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2022 tercapai sebesar 110,23%.

Dalam mencapai target kinerja, KPKNL Bogor menghadapi banyak tantangan, kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat dilalui dengan segala upaya dan rencana aksi yang telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja dapat melampaui targetnya. KPKNL Bogor juga berhasil memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan selama tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun dan semoga dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* KPKNL Bogor. Saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Bogor di masa yang akan datang. Pada akhirnya, KPKNL Bogor belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada dan akan terus berusaha melakukan upaya perbaikan diri terutama dalam hal peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder*.

## **LAMPIRAN**



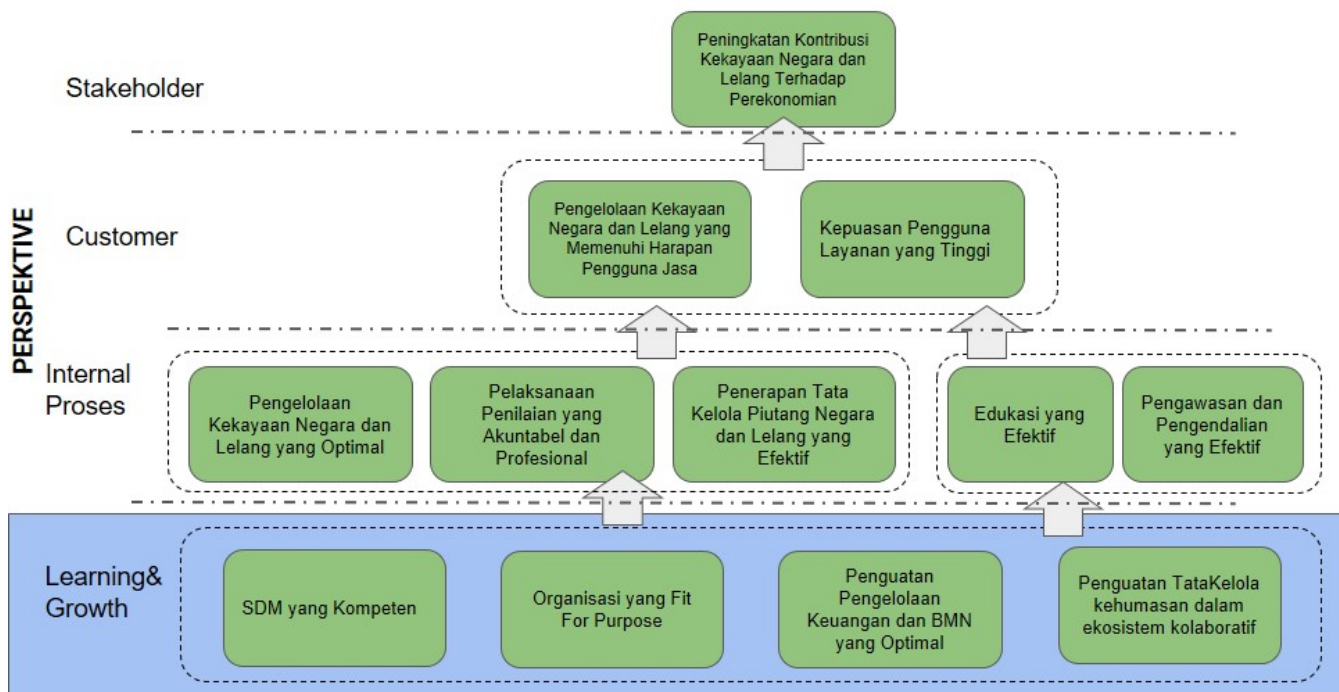
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 9.1/KN.20/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BOGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG B OGOR**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
		8b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang diitindaklanjuti**	97%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

**Kegiatan**

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

**Anggaran**

Rp 476.437.000

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 13 Mei 2022



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	13.450.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	-
3. Pengelolaan Aset	Rp	462.987.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
Dukungan Manajemen	Rp	1.735.634.465
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	32.374.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.681.714.465
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	7.520.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	14.026.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara gor



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG B OGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	9,11%	9,11%	39,11%	39,11%	79,11%	79,11%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	-	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	15,02%	15,02%	45,02%	45,02%	75,02%	75,02%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	25%	25%	50%	50%	75%	75%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,55	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	20%	20%	40%	40%	80%	80%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	10%	10%	20%	20%	33,81%	33,81%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	9%	9%	44%	44%	69%	69%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90	90	-	90	90	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang diitindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	-	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Diandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG B OGOR**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pedawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



## Sasaran Kerja Pegawai

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**PERIODE PENILAIAN**  
14 April 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bimo Aryo	NAMA	Tavianto Noegroho
NIP	197602042002121002	NIP	196507291991031002
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	79,11%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	75.02%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	75%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	80%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	33,81%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	69%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
14	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang di tindaklanjuti	97%
16	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%



17	Organisasi yang fit- for-purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18	Organisasi yang fit- for-purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

## B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo  
NIP 197602042002121002

Jakarta, 14 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho  
NIP 196507291991031002

